



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

**"Tema: 6 (Kebijakan, Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan)"**

### **EKSLUSIFITAS BANTUAN SOSIAL DAN WUJUD KECEMBURUAN SOSIAL PADA MASYARAKAT PEDESAAN**

**Ankarlina Pandu Primadata<sup>1</sup>, Agung Kurniawan<sup>2</sup>, Titis Perdani<sup>3</sup>, Itsna Hidayatul  
Khusna<sup>4</sup>, Navinda Ika Rismayaningrum<sup>5</sup>, Alifio Adlin Enggariato<sup>6</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman**

**<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman**

**<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman**

**<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman**

**<sup>5</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman**

**<sup>6</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman**

### **ABSTRAK**

Penyaluran bantuan sosial seharusnya mampu memberikan keringanan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang terdampak kerentanan akibat pandemi Covid-19, dengan tujuan agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya hingga dapat berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya. Namun, pada realitanya justru penyaluran bantuan sosial menciptakan separasi antara penerima manfaat bantuan sosial dan bukan penerimanya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh bantuan sosial terhadap tingkat solidaritas masyarakat. Guna meneliti realita tersebut maka digunakan metode penelitian yaitu *mix method*, yang mana metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan didukung data kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima manfaat dari bantuan sosial menghadapi eksklusi sosial berwujud stigmatisasi di tengah masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat antar sesama akibat kesenjangan dan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Stigmatisasi yang dibentuk oleh masyarakat terhadap penerima manfaat bantuan sosial diekspresikan dengan rasa kecemburuan sosial. Pada gilirannya rasa kecemburuan sosial yang diekspresikan tersebut merusak kohesi dan kolektifitas masyarakat hingga menciptakan pergeseran pola solidaritas dan gejala konflik dalam kehidupan masyarakat. Adapun wujud pergeseran pola solidaritas tersebut terbingkai pada transformasi nilai yang dianut oleh masyarakat dari kolektivisme menuju individualisme dalam menentukan tindakan sosialnya, sedangkan wujud gejala konflik tersebut terbingkai pada perseteruan yang didasari oleh



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

persoalan kesenjangan dan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Kata kunci : Bantuan sosial, solidaritas sosial, masyarakat pedesaan.

### **ABSTRACT**

The distribution of social assistance should be able to provide socio-economic relief for people affected by vulnerabilities due to the COVID-19 pandemic, to enable them to carry out their social functions so that they can integrate with the surrounding community. However, in reality, the distribution of social assistance creates a separation between recipients of social assistance benefits and non-recipients. Based on this, this research aims to identify the influence of social assistance on the level of community solidarity. To examine this reality, a research method was used, namely the mixed method, which uses a quantitative approach through a survey method supported by qualitative data. The findings show that people who receive benefits from social assistance face social exclusion in the form of stigmatization in society. This cannot be separated from the decline in the level of public trust between people due to errors and inaccuracies in social distribution targets. The stigma caused by society towards recipients of social assistance benefits is manifested by a sense of social synchronization. At the same time, a sense of social reflection causes damage to community cohesion and collectivity, creating changes in solidarity patterns and conflict flare-ups in community life. The manifestation of the shift in solidarity patterns is framed in the transformation of values adopted by people from collectivism to individualism in determining their social actions, while the manifestation of conflict turmoil is framed in feuds based on divided issues and inaccurate targets for the distribution of social assistance.

Keywords: Social assistance, social solidarity, rural communities.

### **PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perkembangan masyarakat. Tidak hanyadalam hal kesejahteraan fisik tetapi juga dalam representasi perilaku kelompok masyarakat dan hubungan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pandemi Covid-19 terjadi secara global, ditemukan pertama kali di Wuhan China Desember 2019; penyakit ini ditularkan melalui saluran pernapasan, proses penularan yang cepat membuat sebagian besar negara di dunia harus menghadapi pandemi Covid-19. Perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia turut meningkat cepat hampir di sebagian besar wilayah, baik wilayah provinsi maupun kabupaten/kota (Sulistyoati, 2021). Setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki tim Gugus Tugas penanggulangan Covid-19. Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia selama 2,5 tahun (Maret 2020 sampai September 2022). Pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat membatasi aktivitas dan kontak fisik; *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditetapkan guna menekan angka peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data statistik per 2 Juli 2021 tren penyebaran Covid-19 semakin



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

tinggi, masyarakat semakin khawatir dan panik.

Kenaikan angka kasus Covid-19 memaksa pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintah pun meluncurkan program bantuan sosial (Bansos) sebagai salah satu bentuk dari jaring pengaman sosial atau jaminan sosial. Bantuan ini bersifat sementara dan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak selama masa pandemi. Bantuan sosial adalah bentuk realisasi dari UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2, isinya menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pemberian bantuan sosial termasuk ke dalam kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah dapat menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan oleh negara dalam satu waktu tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi dan menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Dalam kebijakan pemberian bantuan sosial atau stimulus, hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian dapat bergerak secara perlahan sampai keadaan benar-benar pulih.

Sejak masa sebelum pandemi hingga masa pandemi Covid-19, bantuan sosial gencar dilaksanakan, baik itu berupa pemberian sembako, bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan, listrik gratis dan subsidi, hingga kartu pra kerja, dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan, juga mengurangi kerentanan ekonomi dalam keluarga kurang mampu. Namun, penyaluran bantuan sosial kerap kali mengundang kekecewaan dari masyarakat. Mulai dari penyaluran yang tidak tepat sasaran, data penerima yang tidak akurat dan belum diperbarui, hingga politisasi bantuan sosial.

Selain mengundang kekecewaan masyarakat, bantuan sosial memiliki potensi merusak solidaritas dalam masyarakat. Pemberian bantuan sosial dapat memicu kecemburuan antara masyarakat yang menerima dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut baik pada kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Menurut William, kendala sosial ini tentu berimbas pada interaksi sosial di masyarakat yang telah terganggu dan dirugikan oleh wabah Covid-19 dan pemberian bantuan sosial yang tidak merata. Tentu saja, ini sangat berdampak pada solidaritas sosial, yang diakumulasikan dan dipahat oleh komunitas dalam kehidupan sehari-harinya.

Ritzer dan Goodman (Goodman, 2009) mengklaim bahwa masyarakat desa merupakan kelompok masyarakat yang sangat kohesif dimana kontrol sosial dilakukan secara hati-hati melalui norma-norma masyarakat. Salah satu prinsip dasar modal sosial dalam masyarakat pedesaan adalah solidaritas, yang hanya muncul dalam kelompok masyarakat dengan nilai dan standar yang memungkinkan kelompok tersebut berkembang sesuai dengan kondisinya (Syahra, 2003). Hal tersebut dikarenakan salah satu cara masyarakat di pedesaan untuk memerangi pandemi COVID-19 di sekitar mereka adalah dengan memanfaatkan modal sosial mereka (Buana, 2020). Akibatnya, respon masyarakat terhadap perubahan lingkungan menjadi tolok ukur solidaritas sosial. Jejaring sosial yang hadir dalam setiap kontak, kerjasama dalam kelompok masyarakat, norma yang berlaku, dan budaya atau kearifan lokal yang berkembang di masyarakat merupakan indikator dari eratnya solidaritas sosial.

Solidaritas sosial yang dimiliki masyarakat seharusnya mampu memberikan pijakan bagi masyarakat desa di Kabupaten Banyumas dalam upaya memerangi dan menghentikan



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. Namun, solidaritas yang tidak kuat, membuat masyarakat mengalami konflik kepentingan akibat krisis kepercayaan karena penerimaan bantuan sosial yang tidak merata bahkan tidak tepat sasaran. Kepercayaan, salah satu bentuk modal sosial, sangat penting dalam memerangi pencegahan COVID-19. Jika anggota keluarga atau tetangga terpapar COVID-19, masyarakat desa dengan tingkat kepercayaan yang tinggi antar anggota masyarakat akan lebih mudah melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan, termasuk dalam hal pendataan dan pemberian bantuan sosial bagi anggota masyarakat yang terdampak covid-19. Hubungan ini juga mencegah konflik antararganya yang terdampak COVID-19 dan menerima bantuan sosial. Mereka terus berinteraksi dengan memperhatikan ruang yang sesuai antara tetangga. Kepercayaan yang tinggi juga membuat korban COVID-19 tidak menjadi sasaran stigma negatif, sehingga mempercepat proses rehabilitasi dan resiliensi sosial dan ekonomi mereka berkat dukungan masyarakat.

Sebaliknya, tidak semua masyarakat pedesaan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi antar masyarakat selama pandemi COVID-19. Turunnya kohesi kolektif desa merupakan tanda lunturnya rasapercaya diri. Hal ini terjadi karena kecemburuan sosial terkait bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 yang berkembang antara individu yang menerima bantuan dan yang tidak. Kecemburuan sosial ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang di sekitarnya menjadi berkurang. Masyarakat cenderung tidak percaya informasi tentang kerabat atau tetangganya yang terkena dampak Covid-19, bahkan mereka menganggap informasi tersebut dihembuskan agar tetangganya mendapat bantuan dari pemerintah. Tentu saja hal ini mengganggu hubungan dan interaksi dalam lingkungan sosial masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Primadata dkk (2022) yang berjudul "Modal Sosial Masyarakat Pedesaan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas" mengungkapkan bahwa seiring perkembangan masa Pandemi Covid-19, nilai solidaritas masyarakat pedesaan di Kabupaten Banyumas sudah memiliki tanda-tanda semakin luntur dan memudar; tanda-tanda tersebut mulai terlihat saat salah satu tokoh masyarakat Desa Karangendep menyatakan bahwa masyarakat tidak lagi memiliki keinginan untuk gotong royong membantu masyarakat terdampak Covid-19. Selain itu, adapula pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh (Alon Mandimpu Nainggolan, 2020) yang menyatakan bahwa diperlukan strategi dan inovasi dalam menyalurkan bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran tanpa menimbulkan konflik serta meringankan beban sesama yang terdampak Covid-19. (Iping, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19 : Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial" menyatakan bahwa secara ekonomi, pemberian BLT disatu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kelangsungan usaha serta meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik serta timbulnya korupsi.

Pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sebagai solusi mengatasidampak pandemi Covid-19 pada akhirnya menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, khususnya pada kawasan pedesaan yang dalam kehidupan sehari-harinya seharusnya berpijak pada solidaritas sosial untuk melakukan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengidentifikasi pengaruh pemberian bantuan sosial terhadap tingkat solidaritas masyarakat desa pada masa pandemi



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

covid-19 di Kabupaten Banyumas. Agar tahapan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemberian bantuan sosial terhadap tingkat solidaritas masyarakat desa pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana upaya masyarakat desa di Kabupaten Banyumas dalam mempertahankan solidaritas sosial dan menghindari konflik sosial di masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah desa di Kabupaten Banyumas terkait pemerataan bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19?

### **METODE PENELITIAN**

#### **Lingkup Penelitian**

Penelitian ini masuk dalam lingkup kajian Sosiologi Pedesaan yang membahas tentang tingkat solidaritas masyarakat pedesaan di Kabupaten Banyumas saat pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Obyek kajian ini adalah masyarakat di kawasan pedesaan.

#### **Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian (*mix method*) yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan dan dilakukan dengan survei yang didukung dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian survei menitikberatkan pada penelitian relasional, yakni hubungan variabel-variabel, sehingga secara langsung atau tidak langsung hipotesa penelitian senantiasa dipertanyakan (Singarimbun & Effendi, 1989). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survei dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Pertanyaan dari kuesioner kepada responden bertujuan untuk mendapatkan data secara kuantitatif terkait pengaruh pemberian bantuan sosial terhadap tingkat solidaritas masyarakat desa pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan, data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Kemudian, untuk data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui penelaahan buku-buku yang sesuai dengan topik, jurnal ilmiah yang berguna secara teoritis dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Subjek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa di Kabupaten Banyumas yang mendapat bantuan sosial ditengah situasi pandemi Covid-19. Selanjutnya untuk melakukan survei, sampel ditentukan agar dapat digunakan untuk mewakili populasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut; (1) derajat keseragaman; (2) presisi yang dikehendaki dalam penelitian; (3) rencana analisa; (4) tenaga, biaya dan waktu (Singarimbun & Effendi, 1989).

Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, langkah-langkah yang dilakukan pertama, mengkaji sifat atau karakteristik populasinya, dan kedua, baru menentukan ukuran sampel. Secara umum, tidak ada peraturan yang baku dalam prinsip-prinsip penentuan ukuran besaran sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Menurut Gay et al., (2012)



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

secara umum, ukuran sampel minimum tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan sebagai pedoman ukuran sampel untuk penelitian korelasional, kausal-komparatif, dan penelitian eksperimental yang benar.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* (acak sederhana). Simple random sampling adalah proses pemilihan sampel sedemikian rupa sehingga semua individu dalam populasi yang ditentukan memiliki kesempatan yang sama dan independen untuk dipilih sebagai sampel. Dengan kata lain, setiap individu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih, dan pemilihan satu individu sama sekali tidak memengaruhi pemilihan pada individu lain.

Sedangkan, data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pertama ialah proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi data hasil wawancara dan studi dokumen. Tujuan dari reduksi data ini ialah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Kedua ialah penyajian data yang berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan. Verifikasi adalah langkah terakhir yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi. Guna mengurangi kemungkinan salah interpretasi, digunakan beragam prosedur yang disebut triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan untuk mengklarifikasi atau membandingkan data dan informasi yang berasal dari sumber informasi dan cara pengumpulan data yang berbeda.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas. Lokasi penelitian dipilih karena Kabupaten Banyumas termasuk salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang pernah masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19. Selain itu, secara geografis dan sosiologis, kultur masyarakat di Kabupaten Banyumas masih termasuk masyarakat pedesaan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yang akan mengidentifikasi pengaruh pemberian bantuan sosial terhadap tingkat solidaritas masyarakat desa pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Banyumas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Masyarakat**

Bantuan sosial adalah bantuan yang ditujukan khusus untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Bantuan sosial dapat berupa uang tunai senilai tiga ratus ribu rupiah atau bahan pangan pokok senilai dua ratus ribu rupiah. Para penerima bantuan menerima bantuan sosial setiap satu sampai tiga bulan sekali. Penerima bantuan sosial tidak selalu sama, tergantung pada jumlah dana yang tersedia, terutama dalam kasus di mana bantuan sosial diberikan melalui alokasi dana desa. Namun, terkadang dana bantuan terlambat dibayar. Selain itu, pada lokasi penelitian juga ditemukan data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, juga beberapa temuan yang menunjukkan bahwa ada warga masyarakat yang mendapatkan lebih dari 1 jenis bantuan sosial, sementara beberapa warga tidak mampu atau warga yang masuk dalam kriteria justru tidak mendapat sama sekali.



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

Pada dasarnya, terdapat beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan dalam menentukan apakah seorang warga dapat dikatakan miskin dan boleh menerima bantuan sosial atau tidak. Adapun 14 kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang barang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Rumah tangga dianggap miskin jika memenuhi 9 dari 14 kriteria. Namun, standar penerima bantuan sosial dapat berubah secara bertahap sesuai dengan keadaan dan kondisi. Orang yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial akan menerima surat dari dinas sosial melalui Kantor Pos. Surat tersebut menunjukkan bahwa saudara-saudara yang bersangkutan adalah penerima bantuan sosial. Selanjutnya, mereka dapat mendapatkan kartu sejahtera di Bank Mandiri di kantor kelurahan atau desa. Bank Mandiri adalah salah satu bank yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial. Setiap bulan, bantuan sosial COVID-19 masuk ke rekening tabungan kepala keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp200.000, yang kemudian ditukarkan dengan sejumlah bahan makanan di agen sembako. Bantuan sosial BPNT (bantuan pangan non tunai) disalurkan kepada KPM melalui agen bank Mandiri yang sudah ditunjuk oleh kepala desa dan pendamping desa. Para agen tersebut juga menjadi salah satu sumber informasi bagi para penerima bantuan sosial, sehingga penerima bantuan sosial dapat mengetahui kapan mereka harus mengambil bantuan sosial tersebut.

Masyarakat desa seringkali terlibat dalam konflik karena bantuan sosial. Karena ada kelompok masyarakat yang percaya bahwa penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konflik muncul. Menurut Engel dan Korfdalam (Kinseng 2022), pertanyaan paling penting dalam menganalisis konflik adalah "tentang apa konflik ini?", dan pertanyaan ini mengarah pada masalah yang menyebabkan konflik tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik di masyarakat desa termasuk data penerima bantuan yang tidak valid, jumlah kuota yang terbatas, dan kecemburuan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

yang dilakukan oleh Nurchotimah et al. (2020), yang menemukan bahwa jumlah kuota yang terbatas dan munculnya kecemburuan sosial adalah faktor penyebab konflik di bantuan sosial.

Masyarakat jelas terganggu oleh jumlah bantuan sosial yang terbatas. Seringkali, jumlah masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tidak sebanding dengan kuota yang tersedia. Peneliti juga menemukan bahwa data penerima bantuan sosial yang mengandung nama penerima bantuan sosial yang telah meninggal dunia tidak valid. Informasi yang tidak valid ini dapat menyebabkan konflik di masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Rahmansyah et al. (2020), yang menemukan bahwa puluhan orang di Jepara masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial meskipun mereka telah meninggal.

### **Bantuan Sosial, Konflik dan Solidaritas Masyarakat**

Pemberian bantuan sosial bukan hanya memberikan dampak positif dalam masyarakat, namun juga telah menyebabkan munculnya konflik dalam masyarakat. Kasus pembeberian bantuan sosial yang tidak merata, kasus pemotongan dana bantuan sosial, hingga kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran telah mewarnai pemberian bantuan sosial dalam masyarakat. Kebijakan bantuan sosial diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain bantuan sosial yang telah berjalan sebelumnya, pemerintah juga memberikan bantuan sosial ekstra bagi masyarakat terdampak Covid-19 seperti Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Beras.

Bantuan sosial tidak tepat sasaran karena beberapa masalah muncul. Pertama, data penerima bantuan sosial tidak akurat. Ketika datang ke penyediaan bantuan sosial, ketidakakuratan data selalu menjadi masalah. Salah satu contohnya adalah bahwa tidak semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial belum terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data masih lamban (bbc.com, 27 Juli 2023). Namun, pandemi COVID-19 menciptakan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Bantuan sosial tidak diberikan kepada masyarakat kelompok ini. Tumpang tindihnya program bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama pandemi COVID-19 adalah penyebab tambahan.

Sementara itu, pandemi COVID-19 menyebabkan bencana kesehatan masyarakat yang tak terduga. Sumber daya yang mendukung penyaluran bantuan sosial belum mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Penanganan cepat dan tepat, termasuk pembaruan data, diperlukan untuk mengatasinya. Sementara banyak daerah tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk pembaruan data, belum semua pemerintah daerah secara aktif mendukungnya. Selain itu, sistem bantuan sosial tidak transparan dan akuntabel, yang berpotensi menyebabkan korupsi. Serta tidak ada sistem pengawasan yang memadai untuk memberikan bantuan sosial menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakmerataan bantuan sosial atau bahkan pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sehingga memicu terjadinya konflik jika tingkat solidaritas masyarakatnya lemah.

### **KESIMPULAN**

Bantuan yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam komunitas dikenal sebagai bantuan sosial. Bantuan sosial didistribusikan secara mandiri oleh masyarakat dan agen yang ditunjuk.



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

Dengan menunjukkan kartu tanda penerima bantuan sosial, penerima dapat mencairkan bantuan langsung di agen bank Mandiri. Karakteristik seperti pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah, dan banyaknya tanggungan keluarga adalah ciri umum responden penelitian.

Konflik sosial terjadi karena bantuan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat. Konflik ini hanya melibatkan warga yang berseteru karena mereka tidak menerima bantuan sosial. Konflik ini disebabkan oleh kecemburuan sosial atau iri, kuota bantuan sosial yang terbatas, dan data penerima bantuan sosial yang tidak sah. Keluarga mengatasi konflik melalui mediasi. Sebagian besar responden mengatakan bahwa bantuan sosial membantu keluarga penerima secara finansial, sudah tepat sasaran, dan mudah mendapatkan informasi dan mencairkan dana. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa persepsi terhadap bantuan sosial tidak berkorelasi dengan karakteristik individu, termasuk usia, tingkat pendidikan, pendapatan, tingkat tanggungan keluarga, dan pengalaman.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek Dikti atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian BLU Universitas Jenderal Soedirman.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alon Mandimpu Nainggolan, M. M. (2020). Mengurai Polemik Bantuan Sosial di Masa Pandemi.

DEDICATIO : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.1, 43 - 55.

Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa. SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i.

Iping, B. ( 2020). PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN

PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 1 Issue 2, 516 - 526.

Jhonson, D. P. (2008). Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: PT. Gramedia.

Goodman, G. R. (2009). Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Muhni, D. I. (1994). Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson. Yogyakarta: Kanisius.

Syahra, R. (2003). Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No.1.

Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo.

Z.Rubin, D. G. (2009). Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wolter Weol, M. M. (2020). Mengurai Polemik Bantuan Sosial di Masa Pandemi.



***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

DEDICATIO : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.1, 43 - 55.